

## **Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe**

**Ikhyanuddin Ikhyanuddin<sup>1</sup>, Putri Miranda<sup>2</sup>, Indrayani Indrayani<sup>3</sup>, Nurhasanah Nurhasanah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: <sup>1</sup>ikhyanuddin@unimal.ac.id, <sup>2</sup>putri.180420006@mhs.unimal.ac.id,

<sup>3</sup>indrayani@unimal.ac.id, <sup>4</sup>nurhasanah@unimal.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of the implementation of accrual-based government accounting standards and internal control systems on the financial performance of the Lhokseumawe City government, either partially or simultaneously. This type of research is descriptive quantitative research that emphasizes causal design. The method used for sampling in this study is a non-probability sampling method with a saturated sample type where the entire population is sampled, with as many as 22 Lhokseumawe City Regional Work Units taken 5 respondents to represent each Regional Work Units. The initial research sample amounted to 110 respondents, but there was a realization of the sample so that the total sample was 86 respondents. The data used in this study is primary data with data collection techniques using a questionnaire. The data analysis method in this study used multiple linear regression analysis using SPSS version 26. Tests in this study used validity and reliability tests, classical assumption tests and hypothesis tests. There are 3 classical assumption tests in this study, namely normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Meanwhile, the hypothesis test consists of partial test (t test) and simultaneous test (F test). The test results show that partially, Accrual-Based Government Accounting Standards have a positive and significant effect on Government Financial Performance; and the Internal Control System has a positive and significant effect on the Government's Financial Performance. Simultaneously, Accrual-Based Government Accounting Standards and Internal Control Systems have a significant effect on Government Financial Performance.*

**Keywords:** *Accrual-Based Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Government Financial Performance*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang menekankan pada desain kausal. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode nonprobability sampling dengan jenis sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel, dengan sebanyak 22 SKPD Kota Lhokseumawe diambil 5 responden untuk mewakili tiap SKPD. Sampel penelitian awalnya berjumlah 110 responden, namun terdapat realisasi sampel sehingga total sampel berjumlah 86 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Ada 3 uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji

heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesis terdiri dari uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah; dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Keuangan Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerbitkan Peraturan Walikota mengenai kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya peraturan tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe berupaya menyusun laporan keuangan yang mengikuti peraturan walikota tersebut dengan menerapkan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrua yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan instansi dalam mengelola keuangan (Harahap, 2020).

Hasil audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mana opini diperoleh dari BPK menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2015, LKPD Kota Lhokseumawe mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tetapi Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017-2019. Walaupun penurunan opini audit tersebut tidak terlalu signifikan, namun keadaan tersebut berpengaruh terhadap penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang tidak stabil atau menurun di tahun 2016.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah di Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Patarai, 2016:260). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah SAP edisi terbaru yaitu SAP 2021. Untuk memperkuat kebijakan terkait SAP, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrua. Untuk mendukung beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut, dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2013, tentang Penerapan SAP berbasis akrua di pemerintah daerah yang menjadi pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Lasabuda, Morasa and Tirayoh, 2020).

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja keuangan pemerintah serta dalam peningkatan kualitas kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program kinerja pada instansi pemerintah sangat tergantung pada hasil pembenahan yang dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian intern yang buruk akan dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2018) dan Supraja (2019) dengan memperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua berpengaruh positif dan berhubungan cukup erat terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Sedangkan penelitian Dupe dan Sri (2019) memperoleh hasil penelitian bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Karim dan Mursalim (2019), Hanum, dkk (2017), Mattoasi, dkk (2021), dan Pujiono dkk (2016), memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas dan juga didukung dengan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe**”.

## 1.1 Teori Agensi

Konsep teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan. Dalam pemerintahan digambarkan bahwa rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai agen. Rakyat memberi amanah kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin agar kesejahteraan rakyat terus meningkat. Pemerintah sebagai pengembal amanah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas kinerja pemerintahan yang diajalkan.

## 1.2 Hubungan Antar Variabel

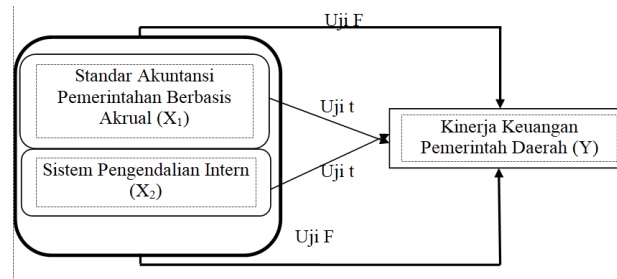
### 1. Hubungan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah yang menggunakan basis akrual. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ini menciptakan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, dan yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

### 2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah perlu sistem pengendalian intern pemerintah yang harus diterapkan dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem pengendalian intern dilakukan sebagai penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

## 1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan didukung dengan teori yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe.
- H<sub>2</sub> : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe.
- H<sub>3</sub> : Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terletak di pemerintah Kota Lhokseumawe. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah melaksanakan seminar proposal skripsi dan dalam jangka waktu satu bulan yaitu pada 22 Februari – 22 Maret 2022.

### 2.2 Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan yang bekerja di 22 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari 15 dinas, 5 badan, 1 inspektorat dan 1 satuan. Dari setiap SKPD masing-masing diambil 5 pegawai sebagai responden yang terdiri dari Kasubbag (Kepala Sub Bagian) keuangan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan 2 pegawai sub bagian keuangan yang berjumlah 110 responden.

#### 2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *nonprobability sampling* dengan jenis sampel jenuh, dengan menjadikan seluruh anggota populasi, yaitu 110 responden menjadi sampel penelitian.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono, 2015:308).

### 2.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X<sub>1</sub>) dan Sistem Pengendalian Intern (X<sub>2</sub>).

Variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skala ordinal dan alat ukur likert. Skala ordinal adalah skala yang sudah memiliki tingkatan namun jarak antar tingkatan belum pasti (Nuryadi *et al.*, 2017:6). Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner yaitu Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

## 2.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan dengan menggunakan alat bantu program *software* aplikasi statistik SPSS (*Statistical Package For Science*). Adapun persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1$  = Koefisien Regresi (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua)  
 $\beta_2$  = Koefisien Regresi (Sistem Pengendalian Intern)  
 $X_1$  = Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua  
 $X_2$  = Sistem Pengendalian Intern  
e = *error* / variabel pengganggu

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Gambaran Umum Kuesioner

Penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung kepada pejabat struktural atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan di 22 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari 15 dinas, 5 badan, 1 inspektorat dan 1 satuan. Waktu penyebaran dan pengembalian kuesioner dilakukan dalam waktu satu bulan yaitu pada 22 Februari sampai 22 Maret 2022. Jumlah kuesioner yang didistribusikan secara keseluruhan kepada responden sebanyak 110 eksemplar. Setelah kuesioner disebar sebanyak 110 eksemplar, yang dikembalikan sebanyak 86 eksemplar dan sisanya sebanyak 24 eksemplar tidak direspon responden. Penelitian ini memiliki tingkat pengembalian responden (*responserate*) sebesar 78,18%.

Tabel 1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar kepada responden	110
Kuesioner yang tidak direspon	(24)
Kuesioner yang direspon responden	86
Tingkat Pengembalian Kuesioner	78,18%

Sumber: Data diolah penulis, 2022

### 1.2 Uji Validitas

#### 1. Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ( $X_1$ )

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ( $X_1$ )

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai $r_{hitung}$ )	Nilai $r_{tabel}$	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,751	0.1786	0	Valid
X1.2	0,87	0.1786	0	Valid
X1.3	0,847	0.1786	0	Valid
X1.4	0,784	0.1786	0	Valid
X1.5	0,804	0.1786	0	Valid

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Pada tabel 2 diketahui nilai  $r_{tabel}$  untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ( $p = 0,05$ ) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau  $n$ . Oleh karena  $n = 86$ , maka derajat bebasnya ( $df$ ) adalah  $n - 2$  ( $86 - 2 = 84$ ). Nilai  $r_{tabel}$  pada  $df = 84$  dan  $p = 0,05$  adalah 0.1786.  $r_{hitung}$  merupakan total nilai *pearson correlation*. Dari hasil output di atas bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut.

## 2. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ )

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ )

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai $r_{hitung}$ )	Nilai $r_{tabel}$	Nilai Signifikansi	Keterangan
X2.1	0,57	0.1786	0	Valid
X2.2	0,625	0.1786	0	Valid
X2.3	0,554	0.1786	0	Valid
X2.4	0,494	0.1786	0	Valid
X2.5	0,636	0.1786	0	Valid
X2.6	0,438	0.1786	0	Valid
X2.7	0,534	0.1786	0	Valid
X2.8	0,639	0.1786	0	Valid

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Pada tabel 3 diketahui nilai  $r_{tabel}$  untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ( $p = 0,05$ ) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau  $n$ . Oleh karena  $n = 86$ , maka derajat bebasnya ( $df$ ) adalah  $n - 2$  ( $86 - 2 = 84$ ). Nilai  $r_{tabel}$  pada  $df = 84$  dan  $p = 0,05$  adalah 0.1786.  $r_{hitung}$  merupakan total nilai *pearson correlation*. Dari hasil output di atas bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir kuisisioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut.

## 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai $r_{hitung}$ )	Nilai $r_{tabel}$	Nilai Signifikan	Keterangan
Y.1	0,58	0.1786	0	Valid
Y.2	0,733	0.1786	0	Valid
Y.3	0,651	0.1786	0	Valid
Y.4	0,623	0.1786	0	Valid
Y.5	0,628	0.1786	0	Valid
Y.6	0,677	0.1786	0	Valid
Y.7	0,453	0.1786	0	Valid
Y.8	0,563	0.1786	0	Valid
Y.9	0,468	0.1786	0	Valid

Sumber: Hasil penelitian diolah, 2022

Pada tabel 4 diketahui nilai  $r_{tabel}$  untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ( $p = 0,05$ ) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau  $n$ . Oleh karena  $n = 86$ , maka derajat bebasnya ( $df$ ) adalah  $n - 2$  ( $86 - 2 = 84$ ). Nilai  $r_{tabel}$  pada  $df = 84$  dan  $p = 0,05$  adalah 0.1786. Dari hasil output di atas bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut.

### 3.3 Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

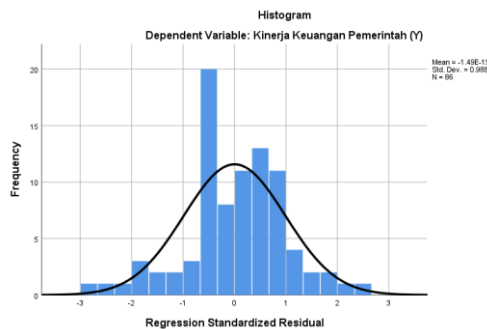
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)	.770	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	.860	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X2)	.684	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan adalah reliabel.

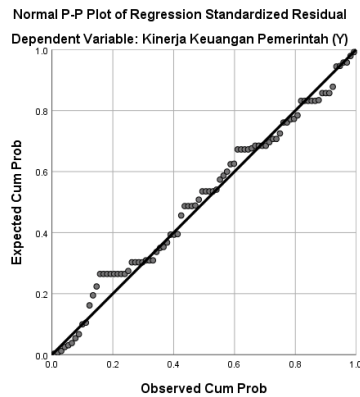
### 3.4 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas



Gambar 2. Grafik Histogram

Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada data yang mengikuti garis diagonal membentuk lonceng berada di tengah-tengah.



Gambar 3. Grafik Normal *PP-Plots*

Berdasarkan gambar grafik normal *PP-Plots* dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada kurva normal *PP-Plots* terlihat titik-titik menyebar mendekati garis diagonal.

## 2. Uji multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

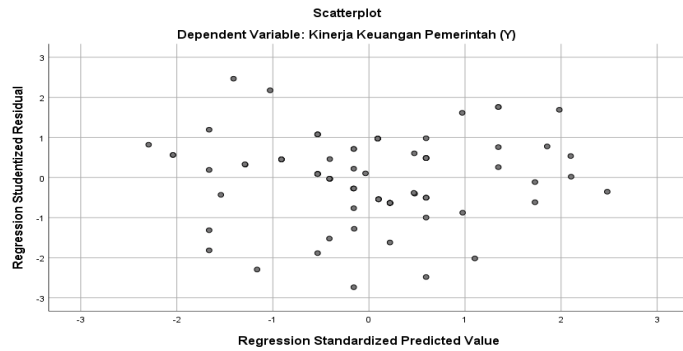
Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	.979	1.021
Sistem Pengendalian Intern (X2)	.979	1.021

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa angka toleransi semua variabel independen > 0,10 dan VIF-nya < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

## 3. Uji heteroskedastisitas



Gambar 4. Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.656	2.228		.743	.459
	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	.045	.074	.067	.603	.548
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	-.030	.056	-.060	-.542	.589

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (X1) adalah 0,548. Sementara, nilai signifikansi (Sig.) untuk sistem pengendalian intern (X2) adalah 0,589. Karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka sesuai dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### 3.5 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.427	3.589		2.069	.042
	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	.247	.120	.165	2.065	.042
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	.733	.090	.651	8.160	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan tabel 8 dari uji regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta ( $\alpha$ ) dari model regresi adalah 7,427 dan koefisien regresi ( $\beta$ ) dari setiap variabel-variabel independen diperoleh  $\beta_1 = 0,247$ ,  $\beta_2 = 0,733$ . Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,427 + 0,247X_1 + 0,733X_2 + e$$

Dari nilai formulasi di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 7,427, artinya jika variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ( $X_1$ ) dan sistem pengendalian intern ( $X_2$ ) dianggap konstan, maka besarnya tingkat kinerja keuangan pemerintah ( $Y$ ) adalah sebesar 7,427.
2. Koefisien regresi  $X_1$  (standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual) atau  $\beta_1$  memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,247 artinya setiap kenaikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ( $X_1$ ) sebesar 1, maka akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah ( $Y$ ) sebesar 0,247, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi  $X_2$  (sistem pengendalian intern) atau  $\beta_2$  memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,733 artinya setiap kenaikan sistem pengendalian intern ( $X_2$ ) sebesar 1, maka akan menaikkan kinerja keuangan pemerintah ( $Y$ ) sebesar 0,733, dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji parsial (Uji t)

##### **Pengaruh variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintah**

Dari hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,065, sementara nilai  $t_{tabel}$  dicari pada tabel statistik dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66298. Dengan demikian nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $2,065 > 1,66298$  dan nilai signifikansi  $0,042 < 0,05$  serta nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) bertanda positif, maka  $H_1$  diterima, artinya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

##### **Pengaruh variabel sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah**

Dari hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,160, sementara nilai  $t_{tabel}$  dicari pada tabel statistik dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dan tingkat 95%. Karena menggunakan pengujian satu arah maka nilai  $t_{tabel}$  didasarkan pada rumus  $df = k-1 = 86-1 = 85$  dan dilihat pada kolom 0,05 (dapat dilihat pada lampiran) maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66298. Dengan demikian nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $8,160 > 1,66298$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  serta nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) bertanda positif maka  $H_2$  diterima, artinya sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

#### 2. Uji simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	322.300	2	161.150	38.655	.000 <sup>b</sup>
	Residual	346.025	83	4.169		
	Total	668.326	85			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X2), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)						

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 38,655. Sementara nilai  $F_{tabel}$  dicari pada tabel statistik dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan rumus  $F_{tabel} : F(k ; n-k) = F(2 ; 86-2) = F(2 ; 84)$  diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,11. Dengan demikian nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yaitu  $38,655 > 3,11$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_3$  diterima, artinya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, dimana setiap adanya peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Selanjutnya, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, dimana setiap adanya peningkatan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah. Terakhir, standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe, dimana setiap adanya peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

##### Saran

Adapun saran peneliti untuk pemerintah Kota Lhokseumawe disarankan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan berkesinambungan sehingga seluruh pegawai bagian keuangan dapat memahami dan menerapkan pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan baik. Bagi peneliti berikutnya di masa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian atau menambah variabel independen lain yang berkaitan erat secara teori dan praktik terhadap kinerja keuangan pemerintah.

#### REFERENCES

- [1] Abdullah, M. (2015) Metodologi Penelitian Kuantitatif. 1st edn. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- [2] Amirullah (2015) 'Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis, dan Teknik)', in Metode Penelitian Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing Malang.
- [3] Ghozali, Imam (2008) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- [4] Ghozali, Imam (2011) Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Harahap, H.F. (2020) 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), pp. 34–38. doi:10.33087/ekonomis.v4i1.87.
- [6] Harjowiryo, M. *et al.* (2014) Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akual. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [7] Lasabuda, A.A., Morasa, J. and Tirayoh, V.Z. (2020) 'Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), pp. 167–174. doi:10.32400/gc.15.2.28068.2020.
- [8] Nuryadi *et al.* (2017) Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian. Yogyakarta: Sibuku Media.
- [9] Patarai, M.I. (2016) Kinerja Keuangan Daerah. 2nd edn. Makassar: De La Macca.
- [10] Sugiyono (2015) Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- [11] Sujarweni, V. Wiratna (2014) SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka baru Press.